

HARIAN  
analisa

Penerbit : PT. Media Warta Kencana  
 Pemimpin Umum : Supandi Kusuma  
 Pemimpin Perusahaan : Sujito Sukirman  
 Pemimpin Redaksi/ :  
 Penanggung Jawab : H. Soffyan  
 Wakil Pemimpin Redaksi : War Djamil  
 Managing Editor : Paulus M. Tjukrono  
 Sekretaris Redaksi : Guntur Adi Sukma  
 Redaktur : H. Agus Salim, Anthony Limtan, H. Hermansyah, SR. Hamonangan Panggabean, Idris Pasaribu, Hendar Tusmin, Kwa Tjen Siung, Saurma, H. Ali Murthado, Sugiarto, Tengku Kamarulzaman, Rizal Rudi Surya, Taufik Wal Hidayat, Zulmaidi, Muhammad Arifin, Zulnaidi, J Anto.  
 Anggota Redaksi : Faisal Pardede, Irfan Nasution, Ridwan, Fahrin Malau, M. Abduh, Ramadan Zukri Sagala, Rhinto Sustono, Amru Lubis, M. Ali Akbar, M. Iqbal Nasution, Hendra Irawan, Mahjajah Chair, Suhayri Ramadan, M. Syahril Mukmin, Dina Nurbetty, Ilham Ridwan, Jaholong Sitanggang, Bardansyah, Bambang Riyanto, Dedy Gunawan Hutajulu, Isnaini Kharisma, Nirwansyah Sukartara, Syafitri Tambunan, Yogi Yuwasta, Adelina Savitri Lubis, Eko Satria Handoko, Indah Pratiwi, Irin Juwita, Nur Akmal, Ahmad Nugraha Putra, Rudi Saputra.  
 Fotografer : Ferdys Siregar, M. Said Harahap, Junaidi Gandy, Khairil Umri Batubara, Qodrat Al-Qadri.  
 Terbit :  
 Tarip Iklan : Rp. 13.000,- per mm/kolom (umum)  
 Rp. 10.000,- per mm/kolom (kabar dukacita)  
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan 20111  
 Kotak Pos : 1481, Telex No. 51326  
 Telepon : Redaksi : (061) 4156655 (5 saluran)  
 Fax. : (061) 4534116  
 Tata Usaha : (061) 4154711 (5 saluran), 4513554, 4524136, 4534279. Fax. (061) 4151436.  
 Perwakilan Jakarta : Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 43-A  
 Jakarta Pusat, Tel. (021) 6322440, 6322271, 6322289  
 Fax. : (021) 6322315  
 SIUPP : SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985  
 Tanggal 24 Desember 1985  
 Dicitak Oleh : PT. SURYA MAS ABADI MAKMUR  
 Jl. Pulau Solor KIM II Mabur - Deliserdang



## Mencari Walikota Paris Van Sumatera

Oleh: Jones Gultom

Meski kurang lebih 1 tahun lagi, namun suhu Pilkada Kota Medan 2020 sudah mulai memanas. Sejumlah nama dikabarkan telah meramaikan bursa calon Walikota Medan periode 2020-2025. Mereka berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang profesi. Antara lain, Edy Ikhsan (akademisi) Sutrisno Pangaribuan, Ikhsan Ritonga dan Dahnil Anzar, Meutyia Hafid, Prananda Surya Paloh (politikus), Baharuddin Sahputra (pegiat kesenian) Maruli Siahaan (purnawirawan polisi). Memang terlalu dini menyebut nama, namun dalam catatan penulis, nama-nama tersebut mulai rajin mengisi panggung-panggung publik di Kota Medan.

Sebagai Kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan terbelah seksi. Kota yang pada abad ke-18 menjadi Paris Van Sumatera, dikenal karena banyak hal. Apakah itu keragaman masyarakatnya, potensi ekonominya, keunikan para politisinya, sejarah tembakau Deli-nya, maupun seni budayanya. Tapi dari semua itu, kini Medan lebih dikenal sebagai kota banjir. Kota dengan drainase yang paling buruk. Tak cukup sampai di situ, setahun terakhir, Kota Medan juga dikenal sebagai kota terjorok se-Indonesia.

Sungguh ironis, padahal Kota Medan dulunya dirancang sebagai hunian yang nyaman, terutama untuk taipan-taipan dari seluruh negara di dunia. Dengan kata lain, Kota Medan di masa kejayaan Tembaku Deli itu sudah dibayangkan akan menjadi pusat ekonomi dunia sekaligus tempat tinggal yang nyaman bagi para pengusaha lintas negara. Berdasarkan sejarah, dijadikannya Medan sebagai kota inti berdasarkan penelitian bahwa kota ini merupakan daerah bebas banjir. Hal itu dikarenakan adanya dua sungai besar yang membelah Kota Medan, yakni Babura dan Deli. Kedua sungai ini menjadi tempat penyaluran air, sehingga air tidak tergenang meskipun hujan turun berhari-hari. Karena itu, sejak diresmikan Belanda pada 1909, diprediksi Medan akan bebas banjir minimal untuk 200 tahun ke depan.

Namun prediksi itu ternyata meleset. Sudah berbilang dekade, kota ini menjadi kota langganan banjir. Tidak perlu hujan berhari-hari, dalam hitungan jam pun, hujan bisa membanjiri Kota Medan. Hal itu terjadi bukan karena penataan awal kota yang salah, namun fungsi dua sungai yang dulunya menjadi penyalur air sudah berubah. Bukannya menyalurkan air, banjir justru kerap terjadi karena luapan kedua sungai ini. Sungai tidak lagi menampung debit air, dikarenakan ekosistem resapan dan daerah aliran sungai yang rusak dan dijadikan pemukiman warga. Air yang masuk ke sungai pun tidak tertampung dan akhirnya tumpah ruah ke permukaan jalan. Kini Medan telah menjadi kota paling tak nyaman dan paling tidak layak dihuni.

Tentunya berbagai persoalan itulah yang akan menjadi produk "jualan" para kontestan bakal calon Wali Kota Medan. Meski solusinya tidak mudah, namun isu ini akan menjadi "jualan" bagi setiap kontestan. Isu menjadikan penataan Kota Medan yang bebas banjir, bebas macet dan bebas preman itulah yang kini menghiasi panggung politik Pilkada Medan 2020. Dari sana, untuk beberapa bulan ke depan, masyarakat akan memiliki waktu untuk mengkaji solusi siapa yang paling rasional dan logis. Jika ini yang dijadikan dasar masyarakat untuk memilih jagoannya, niscaya ada harapan Kota Medan berubah sedia kala.

Hemat saya, masalah Kota Medan hanya satu, yakni goodwill atau niat baik stakeholder-nya. Niat baik itu tentu dasarnya adalah menaati aturan. Tidak perlu visi-misi yang bombastis. Kota Medan sudah terbentuk dan barangkali secara perwajahan kota sulit untuk diubah. Hal paling rasional yang bisa dilakukan adalah membenahi, bukan melakukan terobosan baru. Itupun semua tergantung pemimpinnya, apakah memang serius, mau dan mampu. Sehingga menurut saya, pemimpin yang diperlukan untuk memimpin Kota Medan ini adalah dia yang memiliki syarat sebagai berikut:

Pertama, tidak feodal. Menurut saya

ini penting, mengingat Medan adalah rumah bersama bagi belasan suku. Di Medan dan juga secara umum terjadi di semua kabupaten/kota di Sumatera Utara, feodalisme adalah ciri para pemimpinnya. Tidak peduli kualitas, seseorang bisa menjabat posisi penting, hanya karena dorongan feodalisme itu.

Kedua, tegas. Karakter tegas tentu tidak sama dengan keras apalagi kasar. Tegas dapat diekspresikan dengan tutur kata maupun sikap yang luwes. Ciri ini termasuk yang paling umum diidealkan masyarakat, terutama di akar rumput. Hal itu menjadi gambaran ideal dari sebaliknya kenyataan yang ada, di mana orang Medan dikenal keras bahkan terkesan kasar, namun nyatanya tidak selalu tegas.

Ketiga, meleak seni dan sejarah. Kenapa syarat ini penting? Seni bagi orang Medan sudah semacam kodrati. Dengan kesenian ruang-ruang publik akan dengan mudah dikuasai. Menguasai ruang publik berarti menguasai masyarakatnya. Berdampingan dengan seni itu, referensi sejarah juga penting dimiliki pemimpin Kota Medan. Sejarah akan memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan yang mungkin tidak terpetakan. Lagi pula pemimpin yang memahami sejarah daerah yang dipimpinnya sudah memiliki modal lebih dibanding yang abai sejarah.

Keempat, mau capek dan berani. Barangkali syarat ini yang paling sulit ditemukan karena sudah pasti bertenangan dengan tujuan mereka menjadi pemimpin yang ingin hidup enak dan serba dilayani. Bila memang ingin menjadikan Kota Medan lebih baik lagi, sudah pasti pemimpinnya akan capek luar biasa. Mengapa, karena ia akan berhadapan dengan berbagai persoalan, termasuk menghadapi orang-orang bermacam tipe dan karakter.

Belum lagi harus berhadapan dengan berbagai sistem yang mungkin sudah berlangsung lama untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Termasuk yang dipelihara para mafia dan jaringannya di internal birokrasi itu. Terlanjur, selama ini Kota Medan menjadi "surge" (Bersambung ke hal. 16)

## Kuasa Elite Lokal

Oleh: Riza Multazam Luthfy

KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berencana menguatkan sistem pengawasan dana desa berbasis kolaboratif. Upaya ini akan ditempuh demi menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa yang bisa menjadi rujukan aparat penegak hukum, auditor, serta sejumlah kementerian/lembaga.

Sejak digulirkan pada 2015, dana desa menjadi isu yang cukup sensitif. Apalagi, jumlah dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dari tahun ke tahun semakin besar. Sampai penghujung 2018, pemerintah pusat genap menganggarkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut untuk diberikan kepada desa sebesar Rp 561 triliun.

Melimpahnya dana desa turut menumbuhkan kembali taring kekuasaan elite lokal. Melalui perangkat perundang-undangan, kuasa pemerintahan desa dikukuhkan. Merujuk Ivanovich Agusta (2015), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengokohkan kembali kuasa pemerintahan desa melalui dana desa, berikut wewenang mengelola seluruh program yang masuk desa.

Agusta juga mensinyalir bahwa dengan adanya perolehan honor bulanan bagi perangkat desa, cengkerman pemerintahan desa menjalar sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Gencarnya intensif program dan dana yang masuk ke desa merupakan bentuk kontrol pemerintah pusat dan daerah terhadap implementasi fungsi-fungsi pemerintahan desa.

Terbitnya peraturan perundang-undangan tentang desa tersebut genap menguatkan kuasa pemerintahan desa yang sempat melemah pasca reformasi. Sayangnya, upaya penguatan tersebut berimplikasi serius lantaran turut mengembalikan posisi kepala desa sebagai sosok superior. Padahal, tak lama setelah Soeharto tumbang, derasnya arus demokratisasi dan desentralisasi ternyata mengakibatkan kewibawaan mereka merosot drastis.

Barang tentu hal ini memberikan kegembiraan bagi elite lokal yang sejak lama kehilangan taring. Kini, mereka memperoleh kepercayaan untuk mengelola dana desa yang berjumlah ratusan juta rupiah per tahun di luar proyek-proyek pemerintah pusat yang dititipkan ke desa. Jika fungsi kontrol di desa kurang berjalan maksimal, maka dikhawatirkan kepala desa akan tampil arogan bergaya otoritarian-sentralistik di hadapan warganya. Implementasi kehidupan desa juga akan timpang, sebab kepala desa rentan menjalankan kewenangan secara kebablasan.

Mekanisasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perjalanannya telah memunculkan mekanisme. Bagaimanapun, terdapatnya honor bulanan bagi perangkat desa menyebabkan penetrasi pemerintahan desa dirasakan sampai level RT. Padahal, dahulu kala, RT merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat sukarela. Kondisi demikian menyebabkan selain kemandiriannya dalam berinovasi semakin terbatas, RT juga menjadi penampung kepentingan kekuasaan di atasnya.

Itulah mengapa ketua RT tiada lain merupakan kepanjangan tangan kepala desa di wilayah masing-masing. Akhirnya, kepastian honor membuat kerja perangkat desa semakin mekanis. Tidak ada prakarsa dan inisiatif dalam rangka menajamkan kesejahteraan masyarakat desa. Honor serjantinnya sekadar meniscay-

akan hasil kinerja yang terukur, ber-corak kuantitatif, namun menihilkan kreativitas.

Di samping honor, mekanisasi perangkat desa sebenarnya juga dilakukan melalui seragam dinas. Meskipun bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi perangkat desa dituntut mengenakan seragam ala pemerintah. Atribut ini mengesankan bahwa mereka merupakan bagian dari pemerintah pusat yang menjalankan tugas negara. Pakaian resmi menandakan mereka senantiasa mematuhi apa yang dikehendaki oleh supra desa. Instruksi pemerintah pusat dan daerah merupakan titah yang wajib dilaksanakan. Suasana formal dan teratur melingkupi mereka saat bertugas. Tak heran apabila berkumpulnya para pamong di balai desa lebih merefleksikan petugas kantor dibanding pelayanan masyarakat.

Kepastian honor bagi perangkat desa mendaulat uang sebagai sarana kontrol yang paling efektif. Negara leluasa melakukan pengawasan terhadap rakyat melalui uang. Pengendalian terhadap kehidupan desa cukup mudah diwujudkan dengan uang. Seringkali perangkat desa kehilangan daya kritis ketika dijejali uang. Pada dasarnya uang merupakan perangkat penguasa untuk "mengondisikan" siapa saja yang berani melawannya.

Dengan adanya dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya, pemerintah pusat dan daerah mengikutsertakan pendamping desa yang bertugas mengawalinya. Padahal, boleh jadi pendamping desa membawa ideologi dan misi tertentu yang lebih berpihak pada negara ketimbang desa. Pencairan dana dari atas menyiratkan kemauan supra desa untuk membaca dinamika masyarakat desa.

### Budaya Korupsi

Dalam taraf tertentu, kuasa pemerintahan desa dicemari oleh menjamurnya penyelewengan di level lokal. Bagaimanapun, melimpahnya uang di desa menjadi pemantik korupsi oleh aktor-aktor lokal. Dalam enam bulan pertama 2018, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya 27 kasus korupsi dana desa yang naik ke tahap penyidikan. Data tersebut mengamini tesis bahwa budaya korupsi genap mengakar di negeri ini.

Menurut catatan sejarah, korupsi seolah dilegalkan sejak zaman kerajaan. Korupsi memperoleh jalan lempang sebab raja memberikan keleluasaan bagi elite lokal untuk memperkaya diri. Pada masa silam, kepala desa sebagai tangan kanan raja mendapat peluang besar untuk mengeruk keuntungan dengan jalan haram. Tanpa kepastian gaji, mereka justru leluasa memonopoli tenaga kerja untuk kepentingan pribadi.

Rakyat kecil yang semestinya memperoleh perlindungan justru diperas oleh pemimpinnya. Mereka yang bermental individualistis pasti merasa diuntungkan dengan keputusan raja. Adapun rakyat kecil selalu mengeluh karena menjadi korban kesewenangan elite lokal. Orang desa kerap menerima imbas dan risiko dari kebijakan yang menihilkan eksistensinya.

Kesewenangan kepala desa menurun saat Herman Willem Daendels terpilih menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808-1811. Masa pemerintahan Daendels yang cukup singkat rupanya membatasi dominasi elite lokal. Kebijakan pemerintah menyebabkan penghasilan mereka merosot sedemikian rupa.

(Bersambung ke hal. 16)

## Tajuk Rencana Sterilkan Danau Toba

MENTERI Koordinator Badan Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta Provinsi Sumatera Utara (Pernorsu) menyeterilkan area perairan Danau Toba. Alasannya Danau Toba merupakan destinasi pariwisata yang menjadi sumber devisa bagi provinsi ini. Luhut juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara membuat kebijakan terkait dengan usaha keramba yang dinilai kehadirannya merusak ekosistem Danau Toba. Luhut juga meminta agar tidak ada lagi kotoran ternak yang dibuang ke Danau Toba. "Saya titip Danau Toba kepada gubernur dan bupati, tolong perhatikan kebersihannya dari plastik, keramba dan lainnya. Jangan sampai ikan-nya diekspor yang menikmati orang Swis dan Eropa, kita menerima kotorannya," pesan Luhut.

Sebenarnya apa yang diminta oleh Luhut Binsar Panjaitan itu sudah dimulai oleh Bupati Simalungun dengan menertibkan usaha keramba rakyat. Penertiban itu sukses dilakukannya. Hanya saja kurangnya dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat terkait payung hukum, keramba milik pengusaha besar sulit dijangkau. Karena izin yang dimiliki oleh perusahaan itu diterbitkan oleh pemerintah pusat. Artinya keseriusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seputaran Danau Toba tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari pemerintah pusat.

Pada masa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dipimpin Rizal Ramli juga pernah menggelar rapat koordinasi tindak lanjut pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba bersama empat menteri lainnya. Empat menteri tersebut yakni Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Rakor juga didukung Gubernur Sumut, Kapolda Sumut dan tujuh bupati dari seluruh wilayah yang mengelilingi Danau Toba yakni Bupati Toba Samosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Samosir, Bupati Karo, Bupati Simalungun, Bupati Dairi dan Bupati Humbang Hasundutan.

Hal ini untuk membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam pembentukan badan tersebut agar pengelolaan Danau Toba dapat lebih terkoordinasi. Dengan demikian, kawasan wisata itu bisa menjadi "Monaco of Asia", pariwisata tingkat internasional yang dapat menarik banyak wisatawan mancanegara. Pemerintah serius ingin menggenjot sektor pariwisata sebagai salah satu penopang devisa negara. Salah satu objek wisata andalan adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Ketika itu Rizal Ramli menyatakan bahwa pemerintah hari ini akan membuat sejarah, karena rakyat Sumatera Utara 20 tahun lalu bermimpi menginginkan Danau Toba berkembang.

Namun saat pergantian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dari Rizal Ramli ke Luhut Binsar Panjaitan berpengaruh pada target pengembangan kawasan wisata Danau Toba. Rizal awalnya ingin menyulap danau terbesar di Indonesia itu layaknya kawasan Monaco yang berada di pinggiran Perancis. Namun di bawah Luhut, target tersebut diturunkan menjadi lebih realistis, cukup meniru kawasan wisata Nusa Dua, Bali yang populer lebih dulu di mata turis asing. Kementerian Pariwisata sendiri mengatakan segera mencari mitra swasta untuk mengembangkan kawasan pariwisata danau Toba, yang nantinya akan dikelola oleh Badan Otorita Danau Toba.



## Haji Uma Bantu Biaya Pendidikan Disabilitas

### Subulussalam, (Analisa)

Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman atau akrab disapa Haji Uma memberangkatkan penyandang disabilitas tunanetra, Riski Megana Sagala untuk mengikuti sekolah luar biasa tingkat SD di Kota Langsa, Rabu (10/7).

Keberangkatan Riski yang didampingi orangtuanya Bahrum Sagala juga turut dilepas LO H Uma yang ada di Kota Subulussalam Kaya Alim Bako dan Ketua YARA Perwakilan Kota Subulussalam Edi Sahputra.

Orangtua Riski, Ferri Yani Siregar menyampaikan terima kasih kepada H Uma yang telah membantu pendidikan anaknya mulai dari biaya keberangkatan dan kebutuhan sekolah luar biasa di Kota Subulussalam. Atas bantuan H Uma, cita-cita Riski yang saat ini sudah berumur 8 tahun akhirnya terwujud bisa menempuh pendidikan di SLB.

LO Uma Kaya Alim mengatakan biaya keberangkatan Riski ke Langsa termasuk perlengkapan sekolah ditanggung H Uma. "Semuanya ditanggung H Uma mulai biaya transportasi sampai perlengkapan sekolah Riski. Yang penting kita sampaikan dulu keinginan Riski untuk sekolah ke Langsa," kata Uma melalui LO-nya di Kota Subulussalam Kaya Alim.

Ketua YARA Perwakilan Kota Subulussalam Edi Sahputra, memberikan apresiasi kepada Uma atas kepeduliannya membantu mem-

fasilitasi biaya pendidikan Riski Megana warga Kampong Pegayo, Kecamatan Penanggalan.

"Hari ini kita langsung turun bersama dengan Tim H Uma untuk mendampingi keberangkatan Riski Megana untuk menuntut ilmu ke SLB Kota Langsa. Ini merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa, sangat menyentuh sekali bagi kalangan yang tidak mampu, perjuangan Bahrum orangtua Riski untuk menyekolahkan anaknya sangat besar," ujarnya.

Sebelumnya, berbagai cara telah ditempuh Bahrum termasuk meminta bantuan dari Dinas Sosial Kota Subulussalam, namun harapannya untuk mendapat bantuan kandas. Belakangan muncul sosok dermawan, H Uma membantu biaya keberangkatan dan perlengkapan sekolah Riski selama di SLB Kota Langsa. (sdr)



Analisa/sudirman

**BERANGKATKAN:** YARA Kota Subulussalam bersama LO Haji Uma memberangkatkan penyandang disabilitas tunanetra, Riski ke sekolah luar biasa di Kota Langsa, Rabu (10/7).

## DPD RI Uji Sahih RUU PBB

### Banda Aceh, (Analisa)

Komite IV DPD RI bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar uji sah terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Banda Aceh, Selasa (9/7).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta yang terdiri atas akademisi, birokrat, perwakilan kantor pajak, masyarakat dan media. Juga dihadiri oleh Wakil Rektor IV Unsyiah Dr Hizir Sofyan, Wakil Dekan III FEB Unsyiah, Murkhana SE MBA dan para undangan lainnya.

Ketua Tim Ghazali Abbas Adan mengatakan, sebagai anggota dewan sudah sewajarnya bekerja secara profesional, sesuai dengan tugas dan fungsinya (tupoksi).

Anggota DPD RI asal Aceh ini menjelaskan secara umum tupoksi DPD itu di antaranya adalah fungsi legislasi yaitu dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR serta ikut serta dalam membahas RUU. Selanjutnya pengawasan terhadap kerja pemerintah dan juga terkait dengan *budgeting* (penganggaran).

"Yang lebih utama adalah adanya fungsi representatif dari anggota DPD itu sendiri, yaitu menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat, seperti yang kita laksanakan hari ini untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat pusat," kata Ghazali Abbas.

Ketua Komite IV DPD RI H Aji Padindang, dalam sambutannya mengatakan uji sah ini merupakan tahapan terakhir terhadap RUU PBB. Dan RUU ini merupakan usul inisiatif dari DPD RI.

"Uji sah ini untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi daerah sebagai dasar untuk membahas dan menyempurnakan RUU PBB. Saat ini belum cukup kuat bagi daerah-daerah. Dengan demikian pendapatan daerah pun akan terus meningkat," ujar Aji Padindang.

Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber, yaitu 2 orang Tim Ahli RUU Pajak Bumi dan Bangunan dari DPD RI, yaitu Dr Riatu Mariyatul Qibthiyah, Ph.D dan Tedi Sudarajat SH MH. Kemudian dari Unsyiah, Lilis Maryasih SE Msi Ak, CA dan dari BPKA. (irn)

## Mencari Walikota... (sambungan dari hal. 14)

bagi mereka. Memutuskan jaringan ini, selain capek juga sangat berisiko. Tidak heran, untuk bisa langgeng, selama ini Wali Kota Medan biasanya cari aman atau justru berjejaring dengan kelompok-kelompok yang bermain "di balik

panggung" itu.

Dari keempat syarat ini, bila kemudian pilkada Kota Medan berlangsung hari ini, maka akan sulit siapa yang akan dipilih. Meski begitu, untuk satu tahun ke depan masih ada waktu tersisa untuk menilai siapa yang paling

mendekati. Atau mungkin masih ada orang yang paling tepat yang belum muncul. Publik Medan pun masih setia menunggu Ksatria Piningit, Ratu Adil ini turun gunung.

\*\*\*Penulis adalah jurnalis tinggal di Kota Medan

## Kuasa Elite... (sambungan dari hal. 14)

Bahkan, apa yang mereka "kantongi" cenderung sekadar merupakan pemberian dari atas. Pendapatan yang benar-benar pasti hanyalah gaji. Sehingga, untuk mencari pemasukan lain mereka merasa kesulitan.

Posisi kepala desa terancam jika nekat mengutip keuntungan dari penjualan hasil bumi. Mereka tidak lagi leluasa menambah pundi kekayaan dengan menghisap kekayaan orang-orang

desa. Sanksi atas kasus korupsi membuat mereka berpikir dua kali untuk melakukan penghisapan. Kebijakan ini secara tidak langsung meringankan penderitaan rakyat kecil. Kerja orang desa menjadi lebih ringan lantaran kepala desa tidak lagi membebani.

Getolnya Daendels membasmi korupsi menjadikan beban rakyat otomatis berkurang. Sebelumnya, diperbolehkannya kepala desa mengambil keuntungan

dari hasil panen membuat warga desa kerap diperas oleh pemimpinnya. Kepala desa berhasrat melipatgandakan keuntungan dengan memaksa warganya menghasilkan lebih banyak hasil panen. Ketika target upeti berhasil terpenuhi, kepala desa bisa mengantongi sisanya. Warga desa kerap bekerja di luar kemampuan demi menuruti hasrat elite lokal.\*\*\*

Penulis peneliti desa/Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

## SBMPTN Gagal... (sambungan dari hal. 15)

perlakuan terhadap suatu jenis produk yang ada supaya lebih bernilai. Dan jika dapat ditawarkan sebaiknya pelatihan dilakukan berbasis minat ataupun hobi dari target.

Siswa yang baru tamat tentu saja masih teringat akan apa yang dialami pada masa-masa di sekolah. Begitu juga dengan hobinya setiap individu memiliki hobi pribadi. Usaha yang didorong oleh hobi ini menurut pakar entrepreneurship akan lebih maksimal jika menggeluti usaha yang sesuai

dengan hobinya. Karena seseorang pengusaha akan lebih tertarik dalam teknis pelaksanaannya jika usahanya sesuai dengan hobi yang dimilikinya.

Contohnya adalah, jika seseorang hobinya adalah memasak, maka ada baiknya diami dirikan rumah makan. Jika hobinya adalah melakukan modifikasi motor dan mobil maka ada baiknya dia membuka bengkel otomotif, sebab akan lebih terarah. Begitu juga dengan hobi yang lainnya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa usaha seharusnya linear

dengan hobi.

Oleh karenanya bagi yang tidak diterima masuk ke perguruan tinggi, tidak ada salahnya untuk terjun ke dunia usaha. Berbekal dari kegembiraan yang dimiliki, siapa tau dari antara kegagalan yang dialami saat ini menjadi awal untuk kesuksesan sejati seperti yang dialami oleh Bill Gates dari Amerika dan Jack Ma dari China dan pengikut Jejak Bob sadino dari Indonesia.\*\*\*

Penulis adalah peraih beasiswa National Champion Scholarship